

Mengokohkan Persatuan Bangsa Pasca Konflik Bernuansa Agama di Ambon dan Poso

Masyrullahushomad

Program Pascasarjana Magister Pendidikan Sejarah
Universitas Negeri Yogyakarta

Email: shomadsejarah2013@gmail.com.

ABSTRAK

Indonesia adalah negara yang plural, pluralisme di Indonesia tercermin dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika merupakan simbol pengikat persatuan bangsa Indonesia yang terdiri dari beragam suku, budaya, bahasa, dan agama yang berbeda-beda. Bhinneka Tunggal Ika juga berarti pengakuan terhadap kenyataan sosial historis bahwa rakyat Indonesia telah sejak lama berinteraksi secara rukun dan harmonis. Namun, sangat disayangkan pasca runtuhnya Orde Baru terjadi serangkaian konflik SARA di beberapa daerah. Kota Ambon dan Poso menjadi saksi bahwa kepentingan politik, sosial, ekonomi, dan agama akhirnya mencoreng potret kerukunan dan keharmonisan yang telah terbangun sejak lama. Maka pengokohan nilai-nilai keindonesianness dan nasionalisme menjadi sangat penting untuk kembali dikuatkan. Sehingga kejadian-kejadian konflik yang pernah terjadi di masa lalu tidak terulang kembali pada masa-masa selanjutnya.

Kata Kunci: Kemajemukan, Konflik, dan Persatuan.

ABSTRACT

Indonesia is a plural country, pluralism in Indonesia is reflected in the motto of Unity in Diversity. The motto of Unity in Diversity is a symbol of the binding of the unity of the Indonesian nation which consists of diverse ethnicities, cultures, languages and religions. Bhineka Tunggal Ika also means recognition of the historical social reality that the Indonesian people have long interacted harmoniously and harmoniously. However, it is very unfortunate that after the collapse of the New Order a series of SARA conflicts occurred in several regions. The cities of Ambon and Poso bear witness that political, social, economic and religious interests have finally tarnished the image of harmony and harmony that has been built for a long time. So strengthening the values of Indonesianness and nationalism becomes very important to be strengthened again. So that the events of conflict that have occurred in the past did not happen again in later periods.

Keywords: Diversity, Conflict, and Unity.

PENGANTAR

Pluralistis kultural di Asia Tenggara, khususnya di Indonesia, Malaysia dan Singapura sebagaimana dikemukakan oleh Hefner sangat mencolok. Fenomena pluralisme kultural seperti ini hanya sedikit sekali dimiliki negara lain di dunia. Berdasarkan fenomena inilah dalam teori politik Barat sepanjang dasawarsa 1930 hingga 1940-an, wilayah ini khususnya Indonesia dipandang sebagai “lokus klasik” bagi konsep “masyarakat majemuk/plural” (*plural society*) yang diperkenalkan ke dunia Barat oleh JS Furnival (1944, 1948) (Azra, 2007: 10).

Indonesia sebagai bangsa yang *plural* memiliki semboyan “Bhinneka Tunggal Ika”. Semboyan ini merupakan bentuk pengakuan terhadap kenyataan sosial antropologis penduduk negeri ini yang multi-etnik, multi-budaya, dan multi-agama. Bhinneka Tunggal Ika juga berarti pengakuan terhadap kenyataan sosial historis bahwa rakyat Indonesia telah sejak

lama berinteraksi secara rukun dan harmonis. Rakyat negeri ini dipersatukan dalam satu ikatan batin yang timbul dari faktor-faktor politik dan keagamaan. Persamaan nasib rakyat Indonesia selama masa penjajahan Belanda dan Jepang melahirkan semangat persatuan dalam upaya meraih kemerdekaan (Hadi, 2008: 140).

Sayangnya potret indah kehidupan yang rukun dan harmonis itu ter nodai oleh serangkaian tragedi kemanusiaan yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Sejak awal Reformasi saja telah terjadi peristiwa kerusuhan dan penjarahan di Jakarta. Setelah itu muncul konflik berdarah yang telah memakan korban jiwa dalam jumlah besar. Konflik-konflik bermotif SARA terjadi di Ambon dan Halmahera Utara, Poso, hingga Sambas (Kalimantan Barat) dan Sampit (Kalimantan Tengah) (Hakim, 2014: 111).

Salah satu konflik yang cukup memprihatinkan di Indonesia adalah konflik Ambon

dan Poso. Konflik bernuansa agama ini menyebabkan jatuhnya banyak korban jiwa, kerusakan materiil, dan trauma psikologi yang mendalam. Peristiwa konflik bernuansa agama di Ambon dan Poso menjadi sejarah kelam perjalanan bangsa Indonesia. Pengalaman sejarah yang berharga di masa lalu harus dijadikan pembelajaran penting guna mencari formulasi ideal dalam kehidupan berdemokrasi di Indonesia. Berdasarkan kenyataan tersebut maka makalah ini akan membahas beberapa solusi dalam upaya mengokohkan kembali persatuan bangsa pasca konflik bernuansa agama di Ambon dan Poso.

PEMBAHASAN

Potret Kemajemukan di Indonesia

Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan terbesar di dunia maka tidak heran jika Indonesia dijuluki negara-benua (*archipelago-continental*). Julukan ini bukan tanpa alasan, sebagai negara kepulauan luas keseluruhan

Indonesia melebihi luas daratan benua Eropa. Indonesia memiliki lautan yang luas sebagai “rajut pengikat” pulau-pulau yang ada di dalamnya. Indonesia memiliki 17.508 pulau yang menjadikan Indonesia sebagai negara dengan pulau terbanyak di dunia. Pulau-pulau dan lautnya mengandung potensi kekayaan alam yang sangat luar biasa dan tidak ternilai harganya (Effendy, 2009: 3).

Berdasarkan catatan etnografi, secara keseluruhan ada sekitar 656 suku yang ada di Indonesia. Sedangkan jumlah bahasa yang ada di Indonesia sangat banyak dan beragam. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia merilis setidaknya ada lebih dari 500 bahasa yang digunakan oleh penduduk Indonesia dalam berinteraksi (Simarmata, 2017: 3). Bahkan di Papua saja misalnya, tidak kurang dari 252 suku dengan bahasa khasnya masing-masing (Maarif, 2012: 19).

Indonesia juga dikenal sebagai rumah yang nyaman bagi

beragam pemeluk agama dan penganut kepercayaan lokal. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 dan Undang-Undang (UU) Nomor 5 tahun 1969, terdapat 6 (enam) agama yang secara resmi diakui oleh pemerintah Indonesia dan 1 (satu) kepercayaan lainnya, yaitu: Agama Islam, Agama Kristen, Agama Katolik, Agama Hindu, Agama Budha, Agama Konghucu, dan Kepercayaan Lainnya. Menurut data hasil Sensus Penduduk 2010, dari 237,6 juta jiwa (87,51 persen). Proporsi terbesar berikutnya adalah pemeluk agama Kristen (6,98 persen) dan Katolik (2,92 persen). Sisanya memeluk agama Hindu, Budha, Kong Hu Chu dan lainnya (Dokhi, 2016: 20).

Sedangkan secara politik Indonesia dikenal sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia. Demokrasi adalah sistem yang dipilih oleh bangsa Indonesia sejak berdirinya republik ini. Sejarah sistem demokrasi Indonesia terus berkembang mulai dari Demokrasi Terpimpin yang dipraktikkan

Soekarno pada Orla sampai Demokrasi Pancasila yang diusung Orde Baru. Meskipun kedua model demokrasi tersebut pernah dimanipulasi oleh rezim yang berkuasa, di era Reformasi demokrasi masih tetap dianggap sebagai pilihan terbaik bagi bangsa Indonesia (Wahid, 2009: 157-158).

Problem Kemajemukan di Indonesia

Bangsa Indonesia hidup dalam sebuah masyarakat majemuk (*plural society*). Masyarakat majemuk terwujud dari dipersatukannya masyarakat suku bangsa oleh sistem nasional. Sistem nasional kemudian menyatukannya ke dalam wadah yang disebut negara kesatuan. Masyarakat majemuk di Indonesia adalah produk sejarah, yaitu masyarakat yang dilandasi rasa kesatuan dan persatuan untuk melawan penjajah dan meraih kemerdekaan.

Masalah *pertama* yang paling kritis dalam masyarakat majemuk adalah hubungan antara sistem nasional atau pemerintahan

nasional dengan masyarakat-masyarakat suku bangsa. Masalah ini muncul karena sistem nasional dianggap oleh masyarakat-masyarakat suku bangsa sebagai mengambil alih dan menguasai wilayah-wilayah suku bangsa yang secara tradisi menjadi hak *ulayat* (adat) mereka. Pengambilalihan itu dilakukan dengan menggunakan kekuatan politik dan hukum oleh negara yang didukung oleh militer dan polisi.

Masalah ini memunculkan masalah yang *kedua*, yaitu, diperkuatnya sistem nasional yang otoriter dan militeristis, juga polisional, seperti yang terjadi dalam pemerintahan Presiden Soeharto. Bila sistem nasional menjadi lemah, muncul berbagai pemberontakan separatis, atau timbul konflik antar suku bangsa atau antar keyakinan keagamaan.

Permasalahan *ketiga* muncul dari kedua permasalahan tersebut bahwa masyarakat majemuk Indonesia telah dibangun secara aktual berdasarkan atas kekuasaan penguasa yang mau

tidak mau bertindak otoriter dan militeristis agar dapat mempertahankan kekuasaannya.

Permasalahan *keempat*, munculnya corak administrasi pemerintahan dan birokrasi nasional yang paternalistis (dasarnya pemerintahan feodal). Masalah *kelima* yang timbul dari masyarakat majemuk adalah potensi terjadinya konflik antar komponen masyarakat yang menjadi representasi budaya yang beraneka ragam terutama kalau perbedaan itu tidak dikelola dengan baik. Maka tidak jarang karena adanya kepentingan politik tertentu seperti Pilkada. Perbedaan suku, agama, dan aliran kepercayaan dibenturkan satu sama lainnya sehingga menimbulkan konflik dan kekerasan fisik (Handoyo, 2015: 23).

Konflik Bernuansa Agama di Ambon dan Poso

Keragaman agama ternyata menimbulkan dilema tersendiri dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Satu sisi keberagaman

memberikan kontribusi positif dalam pembangunan bangsa. Sebaliknya di sisi lain keragaman agama dapat juga berpotensi menjadi sumber konflik di kemudian hari. Konflik bisa saja terjadi dan terkadang penyebab konflik disebabkan adanya *truth claim* (klaim kebenaran). Pada kenyataannya konflik paling banyak terjadi lebih dipicu oleh unsur-unsur yang tak berkaitan dengan ajaran agama sama sekali. Konflik sesungguhnya dipicu oleh persoalan ekonomi, sosial dan politik yang selanjutnya di *blow up* menjadi konflik (ajaran) agama (Tim Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2011: 76-77).

Permasalahan agama dalam kultur sosial masyarakat Indonesia memang selalu menggugah emosi yang tinggi di Indonesia. Radius Prawiro (Mantan Menteri Keuangan Orba) memandang dengan terjadinya konflik “entitas bisa menjadi alat”. Jika seseorang ingin menciptakan penggumpalan sosial, ia bisa mencari suatu masalah untuk kelompok itu dan

mengaduk perasaan emosinya. Agama dapat dengan mudah digunakan dengan cara begini. Agama memang “paling peka” dalam konteks Indonesia, identitas agama seseorang sering lebih penting ketimbang identitas etnisnya sebagai Jawa, Ambon, Madura, atau lainnya (Bertrand, 2012: 178).

Sejak jatuhnya pemerintahan Presiden Soeharto 1998, konflik dan kekerasan muncul di beberapa tempat di Indonesia, khususnya di Ambon (Maluku) dan Poso (Sulawesi Tengah). Konflik yang melibatkan umat beragama ini (Muslim dan Kristen) umumnya semula bersumber dari masalah ekonomi, politik, dan sosial. Konflik-konflik tersebut pada akhirnya bermuara kepada konflik agama (Taher, 2009: 25-26).

1. Konflik Ambon

Sebelum terjadinya konflik bernuansa agama, masyarakat Kepulauan Maluku dikenal sebagai masyarakat yang majemuk. Kemajemukan ini dicirikan dengan

heterogenitas etnik dan agama dari penduduk yang mendiaminya. Kepulauan Maluku tidak hanya didiami oleh penduduk asli Maluku, namun juga didiami beragam macam penduduk pendatang. Penduduk-penduduk pendatang tersebut datang dari berbagai macam kawasan di Indonesia, terutama Bugis, Buton, Makassar, Minahasa, Jawa, dan etnis Cina. Keberagaman ini menyebabkan keberagaman yang sama dalam kehidupan keagamaan di Maluku.

Islam dan Kristen Protestan merupakan dua agama yang dipeluk sebagian besar penduduk Maluku dalam proporsi yang cukup seimbang. Selain itu juga terdapat pemeluk agama Katolik, Hindu, dan Buddha dalam jumlah yang tidak terlalu besar. Secara umum, di masa lampau interaksi penduduk yang berasal dari berbagai identitas dan latar belakang berjalan dengan damai dan harmonis. Hal ini minimal ditunjukkan dengan tidak adanya peristiwa-peristiwa konflik yang disebabkan oleh pergesekan etnik

maupun agama di bumi rempah-rempah tersebut (Hadi, 2007: 148-149).

Namun, pasca Reformasi kerukunan dan keharmonisan di Kepulauan Maluku tiba-tiba hilang tak berbekas. Pada tanggal 19 Januari 1999 pecah konflik berdarah di kota Ambon dan akhirnya konflik menyebarluas ke seluruh Kepulauan Maluku. Konflik yang awalnya berawal dari kasus kriminal biasanya akhirnya mengkristal menjadi konflik bernuansa agama. Analisa sederhana tersebut dapat juga dibenarkan, tetapi konflik yang terjadi di Ambon dan Kepulauan Maluku tidaklah sesederhana itu. Konflik yang terjadi di Ambon dan Kepulauan Maluku adalah konflik multidimensi yang bisa dianalisis dari beberapa sudut pandang, baik itu ekonomi, sosial, politik, hukum, dan berbagai analisa lainnya.

Konflik yang terjadi di Ambon dan Kepulauan Maluku menyita perhatian semua elemen masyarakat di Indonesia (langsung maupun tidak langsung).

Sedangkan di Ambon dan Kepulauan Maluku sendiri, konflik kemudian merambah ke semua instansi yang ada. Semua elemen yang terlibat konflik memiliki kepentingan masing-masing untuk terlibat langsung di dalamnya (Boedi, 2009: 54). Baku Bae sebagaimana dikutip Sri Yuarti dalam bukunya *Konflik di Maluku Tengah* membagi konflik ini ke dalam tiga periode, yakni: periode pertama terjadi pada tanggal 19 Januari 1999 yang ditandai dengan peristiwa Idul Fitri berdarah. Periode kedua adalah periode pasca pemilu 1999. Periode ketiga terjadi bulan April awal Mei tahun 2000 yang ditandai dengan masuknya Laskar Jihad (LJ) ke Ambon (Muttaqin, 2015: 281).

Konflik di Ambon dan Kepulauan Maluku lainnya berjalan dalam beberapa tahun. Konflik ini dapat dipandang sebagai suatu proses sosial yang disosiatif dengan tingkat kekerasan yang sangat tinggi dan memakan korban yang sangat banyak (Waileruny, 2011: 151). Tercatat konflik berdarah

yang di mulai pada tanggal 19 Januari 1999 hingga 2002 telah memakan korban lebih dari 6 ribu orang, 300 ribu orang menjadi pengungsi, dan 80% bangunan di kota Ambon hancur luluh. Ibaratnya seluruh peradaban Maluku hancur lebur (Panggabean, 2014: 40; Klinken, 2007: 147-148).

Pada 12 Februari 2002 perdamaian mulai terwujud di antara kedua kelompok yang bertikai, ditandai dengan ditandatanganinya Perjanjian Perdamaian Malino II di Sulawesi. Penandatanganan perjanjian tersebut membuat aksi kekerasan mengalami penurunan secara signifikan, di mana 87 orang dilaporkan meninggal dunia selama kurun Maret-Desember 2002 (Ansori, 2015: 30). Perjanjian Malino II juga menandai sebuah titik balik dalam pendekatan pemerintah untuk mengelola konflik. Baik pemerintah daerah dan pusat menganggap perjanjian damai tersebut menandai dimulainya fase pemulihan konflik. Berbagai LSM dan masyarakat sipil

juga beralih dari penyedia bantuan darurat ke aktivitas pembangunan perdamaian (Bachanan, 2011: 26).

2. Konflik Poso

Berselang beberapa bulan setelah meletusnya konflik Ambon, kemudian muncul juga kejadian serupa di Poso, Sulawesi Tengah. Konflik dengan kekerasan yang juga melibatkan dua komunitas agama yang berbeda juga berlangsung di Poso. Seperti halnya dengan kondisi sosio kultural di Kepulauan Maluku, sebelum terjadinya konflik bernuansa agama Poso kehidupan masyarakat Poso berjalan rukun dan harmonis. Poso sebelum terjadinya konflik dikenal sebagai daerah yang damai dan penuh daya tarik bagi banyak orang. Keindahan alam dan budayanya yang terjaga baik membuat kota ini menjadi tujuan wisata yang menarik bagi para wisatawan. Poso juga merupakan daerah yang memiliki potensi besar dalam bidang perkebunan dan pertambangan (Sudiby, 2001: 93).

Konflik yang diawali oleh adanya pertengkaran sepele antar

anak muda ini, akhirnya memicu konflik antar kelompok agama yang berkepanjangan. Kerusuhan yang terjadi di Poso dari awal terjadi pada 25 Desember 1998 hingga 5 Desember 2001, telah meletus beberapa kali. Kerusuhan tersebut dilabeli dengan nama Konflik Poso Jilid I, II, III, IV, dan V (Rendi, 2014: 56). Sejak tahun 1999 sampai 2001 ratusan rumah dan rumah ibadah hancur dan dibakar, dan korban telah mencapai lebih dari 200 jiwa (Lay, 2009: 10). Jumlah korban tersebut merupakan jumlah yang belum pasti sebab korban dari adanya konflik ini sangat besar.

Konflik ini berhasil diredam pasca penandatanganan Deklarasi Malino untuk Poso (saat ini dikenal dengan Deklarasi Malino I) pada 20 Desember 2001. Deklarasi ini diwadahi pemerintah yang diwakili oleh Jusuf Kalla selaku Menteri dengan 25 wakil kelompok Muslim, 25 wakil kelompok Kristen, 7 orang mediator, dan 24 unsur peninjau (Awaludin, 2009: 58). Walaupun konflik di Poso sudah bisa diredam dan kondisi keamanan sudah

kembali kondusif Pasca Deklarasi Malino. Konflik Poso ternyata masih menyisakan pekerjaan rumah bagi pemerintah karena pasca konflik muncul permasalahan baru yakni isu terorisme di Poso, Sulawesi Tengah.

Penyebab Rapuhnya Fondasi Persatuan Pasca Orde Baru

1. "Keikaan" Kebijakan Orde Baru

Indonesia mengakui keragaman budaya sebagaimana terlihat dari prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Akan tetapi pada masa pemerintahan Orde Baru, yang dilakukan pemerintah Orde Baru dalam tataran pengambilan kebijakan bukannya keragaman melainkan keseragaman. Penerapan kebijakan keseragaman yang dilakukan pemerintah Orde Baru tersebut menjadikan budaya dominan yakni budaya Jawa dipaksakan untuk diterapkan di seluruh masyarakat etnis dan budaya lain di tanah air (Azra, 2005: 120). Kebijakan inilah yang menimbulkan kecemburuan daerah yang kemudian terelaborasi

pasca runtuhnya pemerintahan Orde Baru.

2. Problematik Keadilan dan Hukum

Runtuhnya rezim Orde Baru menyebabkan fondasi keamanan menjadi rapuh. Faktor ketidakmampuan negara dalam menciptakan stabilitas keamanan dan menciptakan keadilan hukum menjadi faktor penting terjadinya konflik di berbagai daerah di Indonesia. Alasan ketidakadilan dalam hukum kemudian menjustifikasi kelompok tertentu untuk campur tangan dalam urusan keamanan. Inilah alasan mengapa organisasi semacam Laskar Jihad misalnya masuk ke Ambon ketika terjadinya konflik (Panggabean, 2011: 30). Kondisi ini juga berlaku ketika terjadinya konflik yang juga bernuansa agama di Poso, Sulawesi Tengah.

3. Ketidakmerataan Ekonomi

Kesenjangan ekonomi antara pusat dan daerah pada masa Orde Baru memang cukup signifikan. Banyak daerah-daerah yang memiliki sumber daya alam

yang melimpah tetapi tidak mendapatkan proporsi pendapatan yang seimbang. Begitu juga dengan kesenjangan sosial yang ada di masyarakat juga terasa cukup signifikan. Kesenjangan ini terjadi akibat pengaruh sentralisasi pembangunan yang hanya terpusat di Jawa. Selain itu, penguasaan ekonomi yang dikuasai segelintir orang (asing, pejabat, dan etnis Cina) mengakibatkan bumiputra kurang mendapat tempat dalam praktik ekonomi Indonesia.

Didik Rachbini dalam Republika (19 Juli 1993) menghitung untuk tahun 1993, sekitar 1% penduduk memperoleh 80 % dari pendapatan nasional. Sedangkan 90 % penduduk di tingkat bawah dan menengah hanya memperoleh 20 % dari pendapatan nasional (Hiyam, 2003: 198). Sedangkan di sisi lain walaupun secara makro angka kemiskinan di Indonesia menurun dari 40 % tahun 1970 menjadi 15,1 % tahun 1990 dan 11,3 % tahun 1996. Pertumbuhan ekonomi dan stabilitas politik pada masa Orde

Baru tidak berbanding lurus dengan besarnya ketimpangan sosio-ekonomi antar golongan. Kondisi ini menyebabkan terjadinya marginalisasi atau eksklusi sosial dan kesenjangan ekonomi antara pusat dan daerah (Triyono, 2007: 93). Kondisi inilah yang kemudian mendorong lahirnya undang-undang otonomi daerah pasca runtuhnya Orde Baru.

Penguatan Nilai-Nilai Persatuan Pasca Konflik Bernuansa Agama di Indonesia

Berikut ini ada beberapa solusi untuk semakin mengokohkan persatuan semua elemen bangsa pasca konflik di Indonesia, yaitu sebagai berikut:

1. Penguatan Kembali Rasa Kesatuan dan Persatuan Bangsa

Berdirinya republik ini memiliki tujuan mulia yakni sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat: *“Kemudian daripada itu untuk membentuk pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia*

dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan tersebut maka perlu di susun rencana pembangunan yang menyeluruh dan terpadu pada bidang ekonomi, politik dan sosial budaya. Pembangunan nasional juga harus

dapat mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab. Hal ini penting sehingga terciptanya suasana kehidupan bermasyarakat yang penuh toleransi, tenggang rasa, dan harmonis (Hadi, 2017: 7).

2. Penguatan Sistem Berdemokrasi

Konflik dalam perspektif antropologi merupakan fenomena sosial yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, terlebih lagi dalam masyarakat yang berbentuk multi budaya. Selain itu, konflik adalah suatu hal yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan bersama. Oleh karena itu, yang perlu dilakukan adalah bagaimana konflik itu dikendalikan dan diselesaikan secara damai dan bijaksana, agar tidak menimbulkan dis-integrasi sosial dalam kehidupan masyarakat (Najwa, 2009: 196).

Dalam mengatasi berbagai konflik yang terjadi di masyarakat, pendekatan konvensional yang hanya bersandar pada negara menjadi sangat problematik.

Demikian pula, penanganan konflik yang hanya cenderung memfokuskan diri pada konflik berbasis kepentingan politik ekonomi dengan tidak memperhitungkan konflik identitas yang ada akan tidak banyak membantu menyelesaikan konflik. Alternatifnya perlu diambil penanganan konflik berbasis pada kelembagaan politik demokrasi yang mampu mengakomodasi kepentingan dan juga pengakuan akan identitas yang ada. Demokratisasi lembaga politik untuk pencegahan konflik akan mencegah konflik sekaligus memulihkan krisis kelembagaan yang ada. Beberapa rekomendasi berikut bisa dipertimbangkan untuk mencegah potensi konflik dalam kebijakan publik mencuat ke permukaan.

Pertama, penting sekali upaya untuk menjembatani kesenjangan (*gaps*) antara negara dan masyarakat sipil guna mengurangi konflik. Penciptaan arena publik (*public sphere*) yang bebas dan demokratisasi arena

publik merupakan salah satu jalan untuk mendekatkan negara dan masyarakat sipil dalam berbagai sektor kebijakan publik.

Kedua, diperlukan sistem, prosedur dan aturan main (*rule of the game*) yang demokratis yang mampu mengakomodasi perwakilan dan partisipasi warga dalam kebijakan publik. Perbaikan mekanisme pengambilan keputusan politik akan mengurangi ketegangan antara pemerintah dan warga sipil. *Ketiga*, dari sisi komunitas sipil adalah sangat penting untuk membangun jaringan kerja sama dan solidaritas untuk memperkuat posisi tawar di hadapan pemerintah. Hal ini tidak hanya mengurangi ketegangan dan konflik yang ada, tetapi juga mentransformasikan posisi pemerintah dan warga sipil menjadi lebih seimbang dalam proses pengambilan keputusan (Triyono, 2004: 15).

SIMPULAN

Beragam konflik SARA yang terjadi pasca runtuhnya Orde Baru menjadi sejarah kelam dalam

perjalanan bangsa Indonesia. Pengalaman berharga dari terjadinya beragam konflik SARA terutama konflik bernuansa agama di masa lalu seharusnya dijadikan bahan evaluasi bagi pelaksanaan kehidupan berdemokrasi di Indonesia. Penguatan nilai-nilai persatuan harus terus dipupuk, sehingga kerukunan dan keharmonisan akan senantiasa terjaga. Begitu juga dengan penguatan fondasi sistem berdemokrasi di Indonesia juga harus diperkuat. Sehingga peran serta semua elemen bangsa akan terakomodir secara maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Ansori, M.H dkk. 2015. *Demokrasi Pasca-Konflik, Kekerasan, dan Pembangunan Perdamaian di Aceh dan Maluku*. Jakarta: The Habibie Center.
- Azra, A. 2005. *Dari Harvard Ke Makkah*. Jakarta: Republika.
- Azra, A. 2007. *Merayakan Kemajemukan, Merawat Indonesia*. Yogyakarta: Kanisius.
- Awaludin, H. 2009. *Perdamaian Ala JK: Poso Tenang, Ambon Damai*. Yogyakarta: Grasindo.
- Bachanan, C (Ed.). 2011. *Pengelolaan Konflik di Indonesia-Sebuah Analisis Konflik di Maluku, Papua dan Poso*. Geneva Switzerland: LIPI dan Current Asia dan the Centre for Humanitarian Dialogue.
- Bertrand, J. 2004. *Nationalism and Ethnic Conflict in Indonesia*. 2012. Terjemahan oleh Achmad Munjid. Yogyakarta: Ombak.
- Hadi, A. 2008. "Multikulturalisme vs Nation-State". *Jurnal Titik-Temu Dialog dan Peradaban Nurcholish Majid Society*, 1 (1), Juli-Desember 2008: 139-159. ISSN 1979-5394.
- Hadi, D.W dkk. 2017. *Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Sikap Toleransi di Indonesia*. Jakarta: Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan (PDSPK) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Boedi, T.S. 2009. "Resolusi Konflik Agama di Pulau Ambon". *Jurnal Ketahanan Nasional Universitas Gadjah Mada*, 14 (2) Desember 2009: 51-60. ISSN 2527-9688.
- Dokhi, M dkk. 2016. *Analisis Kearifan Lokal Ditinjau Dari Keragaman Budaya*. Jakarta: Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan (PDSPK) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Effendy, M. 2009. "Visi dan Strategi Pendidikan Kebangsaan Dalam Perspektif

- Muhammadiyah”, Makalah disampaikan dalam acara Tanwir Muhammadiyah 2009 di Bandar Lampung tanggal 5 s.d. 8 Maret 2009.
- Hadi, S dkk. *Disentergrasi Pasca Orde Baru: Negara, Konflik Lokal, dan Dinamika Internasional*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Hakim, M.A (Ed.). 2014. *Menyongsong 2014-2019 Memperkuat Indonesia dalam Dunia yang Berubah*. Jakarta: Rumah Buku berkerja sama dengan Badan Intelejen Nasional (BIN).
- Handoyo, E dkk, 2015. *Studi Masyarakat Indonesia*. Yogyakarta: Ombak.
- Hisyam, M. 2003. *Krisis Masa Kini dan Orde Baru*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Klinken, G.V. 2007. *Communal Violence and Democration in Indonesia: Small Town Wars*. 2007. Terjemahan oleh Bernard Hidayat. Jakarta: Pustaka Obor.
- Lay, C. 2009. “Kekerasan Atas Nama Agama: Presfektif Politik”. *Jurnal JSP (Ilmu Sosial dan Politik) Universitas Gadjah Mada*, 13 (1) Juli 2009: 1-19. ISSN 1410-4946.
- Maarif, A.S dkk. 2010. *Politik Identitas dan Masa Depan Pluralisme Kita*. Jakarta: Democracy Project Yayasan Abad Demokrasi.
- Muttaqin, Fajrudin, dan Iryana, W. 2015. *Sejarah Pergerakan Nasional*. Bandung: Humaniora.
- Najwa, J. 2009. “Konflik Antar Budaya dan Etnis di Indonesia Serta Alternatif Penyelesaiannya”. *Jurnal Hukum Ius Quai Iustum Universitas Islam Indonesia*, Edisi Khusus Vol. 16, Oktober 2009:195-208.
- Panggabean, R., dan Rafhasadi, M.I. 2011. *Merawat Kebersamaan Polisi, Kebebasan Beragama dan Perdamaian*. Jakarta: Yayasan Paramadina.
- Panggabean, R. dkk. 2014. *Mengelola Keragaman dan Kebebasan Beragama di Indonesia: Refleksi atas Beberapa Pendekatan Advokasi*. Yogyakarta: Program Studi Agama dan Lintas Budaya (CRCS) Sekolah Pascasarjana, Universitas Gadjah Mada.
- Rendi, M. 2014. *Konflik SARA di Kabupaten Poso Tahun 1998-2001*. Skripsi tidak diterbitkan. Makassar: Program Studi Ilmu Politik FISIP Universitas Hasanuddin.
- Simarmata, H.T. 2017. *Indonesia Zamrud Toleransi*. Jakarta: Pusat Studi Islam dan Kenegaraan Indonesia (PSIK-Indonesia).
- Sudibyoy, Agus. 2001. *Politik Media dan Pertaruhan Wacana*. Yogyakarta: LkiS Pelangi Aksara.
- Taher, E.P (Ed). 2009. *Merayakan Kebebasan Beragama Bunga Rampai Menyambut 70*

- Tahun Djohan Effendi.* Jakarta: ICRP bekerja sama dengan Kompas.
- Tim Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. 2011. *Pengkajian Hukum Tentang Perlingungan Hukum Bagi Upaya Menjamin Kerukunan Umat Beragama.* Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.
- Trijono, L (Eds.). 2004. *Potret Retak Nusantara: Studi Kasus Konflik di Indonesia.* Yogyakarta: Center for Security and Peace Studies (Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian) Universitas Gadjah Mada.
- Trijono, L. 2007. *Pembangunan Sebagai Perdamaian: Rekonstruksi Indonesia Pasca Konflik.* Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Wahid, A. 2009. *Ilusi Negara Islam Ekspansi Gerakan Islam Transaksional.* Jakarta: The Wahid Institute.
- Waileruny, S. 2011. *Membongkar Konspirasi di Balik Konflik Maluku.* Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.